Kekerasan terhadap perempuan dalam program hukum dan kriminal di televisi: analisis perspektif feminis sosialis terhadap sudut pandang pengelola program Derap Hukum SCTV

Hastuti Wulanningrum, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=112642&lokasi=lokal>

Abstrak

Media massa dan perempuan merupakan dua hal yang hampir tidak dapat dipisahkan. Hal ini terwujud melalui hadirnya sosok perempuan yang direpresentasikan di media massa. Melihat fenomena yang marak terkait dengan kemunculan sosok perempuan di media massa, pada umumnya perempuan hanya digambarkan sebagai alat pemanis atau sebuah komoditas demi kepentingan-kepentingan tertentu. Salah satu bentuk media massa yang memiliki pengaruh sangat besar bagi khalayak adalah media televisi. Beragam bentuk paket program ditawarkan oleh media televisi. Namun maraknya program-program yang ditayangkan cenderung membentuk suatu eksploitasi terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat. Eksploitasi tersebut mengarah pada kondisi diskriminasi terhadap satu pihak. Salah satu bentuk terjadinya kondisi diskriminasi tersebut tergambar dalam tayangan berita kriminal. Program ini muncul seiring dengan kondisi realita sosial yang menunjukkan tingkat kriminalitas yang semakin hari semakin tinggi akibat banyak faktor. Diusungnya laporan investigasi dalam bentuk program hukum dan kriminal bertujuan untuk meningkatkan empati serta kewaspadaan masyarakat akan bahaya kejahatan yang dapat mengintai siapa saja.

Namun hal yang mengganggu dan sekaligus menarik untuk ditelaah adalah adanya perilaku eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dalam pembentangan pada tayangan kriminal tersebut. Media televisi seolah kian menjadi lahan subur bagi bentuk pendiskriminasian perempuan secara simbolik melalui pemberitaan-pemberitaan yang bombastis sehingga mampu menyedot perhatian khalayak. Perempuan yang mendapatkan perilaku diskriminatif berada dalam posisi sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai korban kejahatan. Sementara itu, individu yang melakukan perilaku eksploitasi dan diskriminasi tersebut adalah laki-laki yang menjadikan perempuan sebagai korban kejahatan, atau bahkan pihak-pihak yang berwenang, ketika perempuan berada pada posisi sebagai pelaku kejahatan. Untuk itu, penelitian ini hendak memperlakukan sudut pandang jurnalis atau pengelola program Derap Hukum dari perspektif feminis sosialis, perihal bagaimana ideology-ideologi yang melatarbelakangi kerangka berpikir mereka sehingga tercermin dalam hasil produksi yang kemudian disalurkan ke ruang-ruang keluarga.

Penelitian ini menggunakan perspektif feminis sosialis dalam kerangka ekonomi politik kritis. Data-data diperoleh dan hasil wawancara terhadap informan-informan penting di balik proses produksi program Derap Hukum. Selain itu, observasi terhadap tayangan episode-episode Derap Hukum sepanjang tahun 2006 juga dilakukan untuk mengklarifikasi pernyataan-pernyataan informan dengan hasil produksi mereka sendiri. Data sekunder sebagai pelengkap, diperoleh dari penelusuran berbagai literatur terkait.

Hasil penelitian menemukan adanya kepentingan-kepentingan ekonomi politik media yang menjadi kerangka konsep berpikir para pengelola program Derap Hukum terutama sang pemegang wewenang dan keputusan tertinggi. Subordinasi terhadap perempuan terlihat jelas dalam representasi tayangan. Hal tersebut ternyata merupakan strategi untuk menjangkau khalayak sebanyak-banyaknya demi peraihan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan demikian, ideology patriarki dan budaya kapitalisme media masih

mendominasi kinerja rumah dalam memproduksi tayangan bagi khalayak yang tidak hanya dikhususkan oleh laki-laki. Ironisnya, tayangan tersebut justru menyajikan proporsi yang tidak seimbang dan cenderung menyudutkan perempuan. Dengan demikian, stigma perempuan yang rentan dengan tindak kekerasan diperkuat dengan representasi perempuan dalam layar kaca yang tidak lain dijadikan sebagai sebuah komoditas tersendiri bagi institusi media yang mendatangkan banyak keuntungan.

Akhir penelitian ini berupaya memberi solusi pada permasalahan yang ada melalui implikasi penelitian. Pertama, media televisi hendaknya mampu melakukan suatu gebrakan untuk mengangkat derajat perempuan dari keterpurukan yang semakin diperparah dengan representasinya secara simbolik dalam tayangan hukum dan kriminal. Hal tersebut mampu membuktikan bahwa perempuan memang rentan kejahatan namun bukan berarti perempuan kayak didiskriminasikan dalam segi apapun yang tidak setara dengan laki-laki. Kedua, peran negara untuk berintegrasi dengan media dapat dilakukan dengan terus-menerus melakukan sosialisasi zero tolerance policy of violence against woman, tanpa melakukan intervensi berlebihan pada institusi media.

Akhirnya, penelitian ini merekomendasikan bagi penelitian selanjutnya untuk lebih mengupas secara lebih lengkap dan komprehensif mengenai praktik kapitalisme dalam kepentingan ekonomi politik media di balik representasi muatan tayangan yang diproduksi dalam konsep ekonomi politik media yang lain yaitu spesialisasi dan strukturasi. Karena pengaruh kepentingan ekonomi politik dalam tubuh institusi media tersebut memberi penetrasi yang sangat kuat kepada khalayak sebagai konsumen. Di samping itu, penelitian-penelitian seputar representasi sosok perempuan dalam media massa perlu dilakukan secara berkesinambungan sebagai upaya memberi kesadaran bagi jurnalis mengingat dunia jurnalis masih didominasi oleh ideologi patriarki yang teramat kuat.